



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
UNIT KERJA : PERWAKILAN BKKBN PROVINSI BANGKA BELITUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FAZAR SUPRIADI SENTOSA
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 157504

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 239 m²/84 m² di BANGKA TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 204 m²/120 m² di BANGKA TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 20.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA FIT SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA REVO HONDA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 22.321.204

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 992.321.204

III. HUTANG Rp. 140.283.200

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 852.038.004

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.